

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas rahmat dan hidayahNya Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dapat menyusun Rencana Strategis yang merupakan salah satu pedoman dalam melaksanakan program dibidang Pengendalian Penduduk Penyuluhan dan Penggerakan, Keluarga Berencana, Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga. Dalam menyusun Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengacu pada pada visi misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih, dan digunakan sebagai acuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan dalam kurun waktu 2019-2023.

Penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga selesainya Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk ini.

Akhirnya terbentang harapan semoga Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk ini dapat menjadi pedoman bagi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Nganjuk. Karena berbagai keterbatasan yang dimiliki penyusun, maka kritik serta sumbangsih saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi sempurnanya Rencana Strategis ini.

Nganjuk, 1 April 2019

KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK DAN
KELUARGA BERENCANA
KABUPATEN NGANJUK

SUGENG BUDI WIYONO, SKM. MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19640823 198703 1 008

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
1.4. Sistematika Penulisan.....	5
BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PPKB	8
2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi	8
2.2. Sumber Daya	12
2.3. Kinerja Pelayanan	18
2.4. Peluang dan Tantangan	22
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS	24
3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan.....	24
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	25
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur.....	27
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	30
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	32
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	34
4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas PPKB	34
4.2. Sasaran	35
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	37
5.1. Strategi Dinas PPKB Kab. Nganjuk.....	37
5.2. Arah Kebijakan	39
5.3. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	40
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN.....	44
6.1. Rencana Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	44

BAB VII	KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA	49
7.1.	Indikator Kinerja Utama (IKU)	49
7.2.	Indikator Kinerja Kunci (IKK)	52
BAB VIII	PENUTUP	53

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 41 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Daerah No. 09 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perencana Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk, Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DPPKB) Kabupaten Nganjuk sebagai lembaga teknis pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintah Daerah wajib merumuskan strategi pembangunan, kebijakan umum, program dan kegiatan yang mencakup gambaran sesuai dengan misi ke-3 Bupati dan Wakil Bupati terpilih yaitu Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Sehubungan dengan hal tersebut maka perlu disusun sebuah konsep strategi kebijakan pembangunan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi di Kabupaten Nganjuk. Menindaklanjuti peraturan tersebut, Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk berkewajiban melaksanakan Program Daerah yang tertuang dalam RPJMD Kab. Nganjuk tahun 2018-2023 sebagai breakdown dari visi misi Kepala Daerah. Dengan adanya integrasi dan sinergitas terkait dengan visi misi Kepala Daerah, diharapkan dapat memberikan hasil yang maksimal khususnya bagi kepentingan masyarakat.

Visi dan Misi Kepala Daerah tersebut diharapkan menunjang pembangunan yang ada di Kabupaten Nganjuk yang dituangkan dalam visi & misi, tujuan, sasaran OPD, yang diterjemahkan dalam program dan kegiatan OPD. Upaya pembangunan ini ditujukan untuk kepentingan seluruh penduduk tanpa membedakan jenis kelamin tertentu. Peningkatan kualitas hidup manusia yang disesuaikan dengan keberagaman aspirasi dan hambatan kemajuan keseluruhan kelompok masyarakat akan dapat menjamin keberhasilan pembangunan. Namun

demikian tidak dapat dipungkiri, pada pelaksanaannya masih terdapat kelompok penduduk yang tertinggal dalam pencapaian kualitas hidup. Ketertinggalan ini disebabkan oleh berbagai persoalan pelik yang seringkali saling berkaitan satu dengan lainnya. Pembangunan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, juga menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Pembangunan berkelanjutan diharapkan juga menjadi fokus utama Pemerintah Daerah dimana integritas penduduk dan pembangunan menjadi satu kesatuan. Dua hal pokok yang harus diperhatikan adalah :

1. Penduduk tidak hanya diperlakukan sebagai objek namun juga subjek pembangunan
2. Pemberdayaan dan meningkatkan kapasitas penduduk

Pembangunan yang berwawasan kependudukan merupakan poin utama dalam pembangunan yang memperhatikan potensi penduduk, kondisi penduduk dan lingkungan dengan tujuan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Oleh sebab itu, dibutuhkan adanyadukungan dari pemerintah untuk menciptakan suatu kondisi pembangunan yang berwawasan kependudukan.

Di samping itu, isu kependudukan saat ini tengah menjadi perhatian bersama di Kabupaten Nganjuk. Salah satu hal yang menjadi fokus pembangunan Kabupaten Nganjuk adalah tentang isu pembangunan berwawasan kependudukan. Indikator yang dijadikan acuan untuk pencapaian isu strategis kependudukan di Kabupaten Nganjuk adalah tentang Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP).

Dalam mengukur keberhasilan program keluarga berencana, salah satu indikator yang digunakan yaitu dengan melihat *Total Fertility Rate (TFR)*, oleh sebab itu perlu didorong *continue* untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB.

Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah bahwa pengadaan alat obat dan kontrasepsi (Alokon) menjadi urusan Pemerintah Pusat sedangkan Pemerintah Daerah hanya mempunyai wewenang untuk melakukan pendistribusian saja. Meskipun demikian, Pengadaan Alokon tetap didasarkan kepada kebutuhan yang ada di Kabupaten. Kebutuhan ketersediaan sarana alokon didasarkan pada jumlah *Unmeet need* yang ada di daerah. Adapun jumlah unmeet need plus hamil yang ada di Kabupaten Nganjuk adalah sebagai berikut :

No	Uraian	2015	2016	2017
1	Ingin Anak Segera	14.568	17.216	16.474
2	Ingin Anak Tunda	9.704	9.919	10.125
3	Tidak Ingin Anak Lagi	11.685	12.775	12.310
4	Hamil	5.799	4.782	5.618
	JUMLAH	41.756	44.692	44.527

Berdasarkan data diatas maka dapat dilihat bahwa ketersediaan alat kontrasepsi sudah sesuai dengan jumlah kebutuhan peserta PUS yang ingin ber-KB tapi tidak terpenuhi (*Unmeet Need*). Sehingga tidak ada kekurangan dalam ketersediaan alat obat dan kontrasepsi dengan kebutuhan Pasangan Usia Subur yang ingin ber-KB.

Untuk Mendorong terwujudnya capaian pelayanan keluarga berencana yang optimal, Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk telah bermitra kerja dengan beberapa instansi pemerintah atau organisasi non formal. Ada beberapa MOU yang dibangun bersama dengan PKK, TNI, Polres dan Polsek dalam mensukseskan pelayanan KB. Dengan harapan keikutsertaan masyarakat dalam ber-KB semakin meningkat.

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana disusun atas dasar:

1. Landasan idiil : Pancasila
2. Landasan Konstitusional : Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945
3. Landasan Operasional :
 - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
 - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4438);

- Undang-undang Nomor 52 tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Berencana
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun (Lembaran Negara RI Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
- Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 2015-2019;
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan
- Permendagri 86 Tahun 2017 tentang Tata cara perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah, tata cara evaluasi rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangka panjang daerah dan rencana pembangunan jangka menengah daerah, serta tata cara perubahan rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana kerja pemerintah daerah;
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2006 Nomor 12 Seri E);

- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 14 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Nganjuk Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2003 Nomor 19 Seri E);
- Peraturan Daerah Kabupaten nomor 09 tahun 2009 pasal 8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Dinas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Nganjuk;
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 08 Tahun 2016 tentang pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2016 Nomor 9);
- Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2014 – 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun 2014 Nomor 01);
- Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk.

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis adalah memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan. Adapun tujuannya adalah terwujudnya pelaksanaan program dan kegiatan dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dalam rangka melaksanakan program pembangunan jangka menengah daerah sehingga secara bertahap dapat mewujudkan cita-cita masyarakat Kabupaten Nganjuk. Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini akan menjadi pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan sertasebagai acuan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk.

1.4. Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk disusun dengan sistematika sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Landasan Hukum

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS PPKB

2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

2.2. Sumber Daya

2.3. Kinerja Pelayanan

2.4. Peluang dan Tantangan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas PPKB

4.2. Sasaran

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. Strategi Dinas PPKB Kab. Nganjuk

5.2. Arah Kebijakan

5.3. Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

BAB VIII PENUTUP

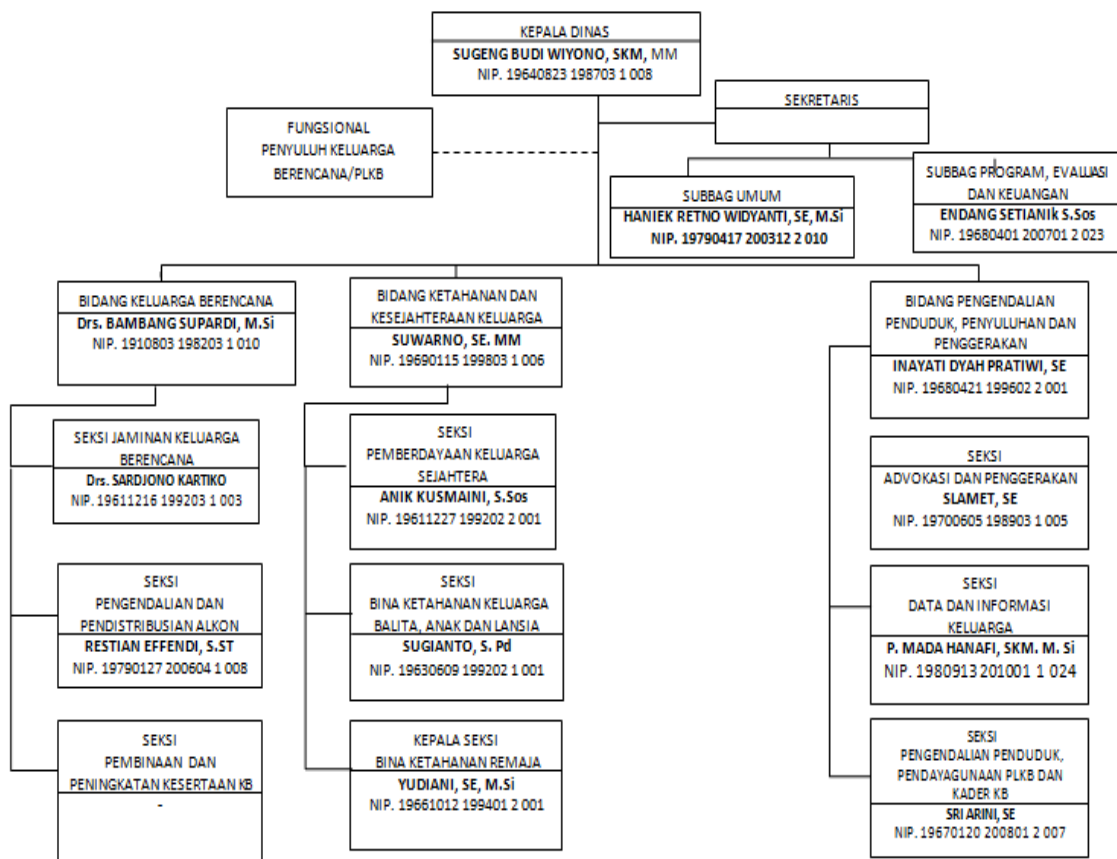
BAB II
GAMBARAN PELAYANAN DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK
DAN KELUARGA BERENCANA

2.1. Struktur Organisasi dan Tugas Pokok dan Fungsi

Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 41 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk.

2.1.1. Struktur Organisasi

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebagai lembaga Pemerintah Daerah Kabupaten Nganjuk mempunyai Struktur Organisasi sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Bagan Organisasi Dinas PPKB

2.1.2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Daerah Kabupaten Nganjuk yaitu :

“Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Daerah di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana“.

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- b. Pelaksanaan kebijakan teknis urusan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
- d. Pelaksanaan administrasi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

Adapun tugas pokok dan fungsi setiap bidang urusan adalah sebagai berikut :

1. BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK, PENYULUHAN DAN PENGGERAKAN

TUGAS :

Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan mempunyai tugas merencanakan pembinaan, memfasilitasi pelaksanaan kebijakan teknis, mengkoordinasikan, mengolah, memantau dan mengevaluasi program dan kegiatan di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan dan penggerakan.

FUNGSI :

- a. Perumusan kebijakan teknis daerah di bidang pengendalian penduduk, penyuluhan, dan penggerakan dibidang pengendalian penduduk
- b. Perencanaan kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi.
- c. Penyiapan bahan koordinasi keterpaduan program tentang pengendalian penduduk.

- d. Merencanakan bimbingan dan pembinaan pelaksanaan program pengendalian penduduk dan pemutakhiran data keluarga.
- e. Merencanakan Pelaksanaan Pemutakhiran data keluarga
- f. Merumuskan kebijakan teknis yang diintegrasikan melalui program-program kependudukan di daerah
- g. Melakukan pemantauan atas program dan kegiatan tentang pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga
- h. Pelaksanaan pendayagunaan tenaga penyuluh KB (PKB/PLKB) dan kader KB
- i. Melakukan evaluasi dan membuat laporan atas program kegiatan pengendalian penduduk, data dan informasi keluarga
- j. Melaksanakan tugas tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas Sesuai dengan tugas dan fungsinya

2. BIDANG KELUARGA BERENCANA

TUGAS :

Bidang Keluarga Berencana mempunyai tugas merumuskan dan merencanakan program, menganalisis, menyelenggarakan pelayanan keluarga berencana, pembinaan dan peningkatan kesertaan ber-KB sekaligus melakukan pengendalian, pendistribusian sarana alkon, monitoring serta evaluasi pada program Keluarga Berencana.

FUNGSI :

- a. Perumusan dan perencanaan kebijakan operasional pelaksanaan program dan kegiatan keluarga berencana.
- b. Pengelolaan jaminan pelayanan Keluarga Berencana serta penanggulangan masalah pelayanan
- c. Penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis pembinaan institusi masyarakat pendukung program Keluarga Berencana.
- d. Menyiapkan susunan strategi program rintisan untuk pelayanan Keluarga Berencana di wilayah khusus.
- e. Melaksanakan koordinasi lintas dinas dan lintas program untuk pemantapan komitmen operasional dalam pelayanan, pembinaan dan peningkatan ber KB.

- f. Melaporkan dan mengevaluasi hasil program Keluarga Berencana.
- g. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

3. BIDANG KETAHANAN DAN KESEJAHTERAAN KELUARGA

TUGAS :

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kebijakan teknis di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.

FUNGSI :

- a. Merumuskan kebijakan teknis daerah di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- b. Membuat pelaksanaan NSPK di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- c. Merumuskan pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Balita, Anak dan Lansia.
- d. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang pembinaan Ketahanan Remaja
- e. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Bina Keluarga Lansia
- f. Pelaksanaan kebijakan teknis daerah dibidang Pemberdayaan Keluarga Sejahtera melalui usaha mikro keluarga
- g. Pemberian bimbingan teknis dan fasilitasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga.
- h. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi di bidang ketahanan dan kesejahteraan keluarga
- i. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai tugas dan fungsinya.

2.2. Sumber Daya Dinas PPKB

2.2.1. Kepegawaian

Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk mempunyai potensi sumber daya manusia yang berasal dari lingkup pemerintah daerah dan pendayagunaan fungsional PKB dari pusat (BKKBN). Adapun jumlah pegawai berdasarkan pangkat/golongan dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.1

Tabel Jumlah Pegawai Berdasarkan Pangkat/Golongan

No	Pangkat/Golongan	Pemda	PKB
1.	Pengatur Muda/IIa	0	0
2.	Pengatur Muda Tk.I/IIb	2	0
3.	Penata / IIc	2	0
4.	Pengatur Tk.I/IIId	2	0
5.	Penata Muda/IIIa	3	21
6.	Penata Muda Tk.I/IIIb	3	14
7.	Penata/IIIc	9	7
8.	Penata Tk.I/IIId	4	20
9.	Pembina/IVa	3	7
10.	Pembina Tk.I/IVb	0	13
11.	Pembina Utama Muda /IVc	1	0
	Jumlah	29	82

Disamping penjelasan mengenai komposisi jumlah pegawai Dinas PPKB Kab. Nganjuk, berikut kami jelaskan terkait pegawai menurut Eselon dan Pendidikan. Adapun komposisinya adalah sebagai berikut :

Tabel 2.2

Tabel Jumlah Pegawai menurut Eselon dan Pendidikan

No	Jabatan	Pendidikan	Jumlah
1.	Eselon II B	S2	1
2.	Eselon III A	S2	0
3.	Eselon III B	S2	2
4.	Eselon III B	S1	1
5.	Eselon IV A	S2	3
6.	Eselon IV A	S1	7
7.	Eselon IV B	S1	0
	Jumlah		14

Berdasarkan pada penjelasan diatas, dapat kita lihat bahwa potensi Sumber Daya Manusia yang ada di Dinas PPKB Kab. Nganjuk masih belum mencukupi dari segi jumlah pegawai. Dengan beban kerja yang semakin meningkat, akan tetapi jumlah pegawai

makin tahun makin mengalami penurunan. Dari jumlah PKB/PLKB yang ada di Dinas PPKB Kab. Nganjuk sejumlah 82, dengan jumlah desa/kelurahan sebanyak 284 desa, setiap 1 PKB/PLKB rata-rata mendapatkan 3 desa. Di samping itu jumlah staf yang ada, tidak mencukupi untuk beban pekerjaan yang semakin tinggi di Dinas PPKB.

2.2.2. Sarana dan Prasarana

Dinas Pengendalian Penduduk Keluarga Berencana untuk kelancaran pelaksanaan tugas telah didukung dengan beberapa sarana dan prasarana diantaranya :

Sarana Transportasi :

- Kendaraan operasional roda 4 : 9 unit
- Kendaraan operasional roda 2 : 127 unit

Sarana bangunan gedung :

- Bangunan kantor : 1 lokasi
- Bangunan Balai PKB : 18 lokasi

Sarana alat-alat kantor :

- Komputer/ PC :

- Dinas : 14 unit
- Balai PKB : 20 unit

- Laptop :

- Dinas : 4 unit
- Balai PKB : 72 unit

- LCD : 11 unit

- AC split : 10 unit

- Sound System

- Dinas : 1 unit
- Balai PKB : 21 unit

Kelengkapan Sarana dan Prasarana ini diperuntukkan bagi kebutuhan bekerja para personil Dinas PPKB yang ada di sekretariat maupun dilapangan, penggunaan sarana prasarana khususnya laptop diperuntukkan bagi petugas lapangan yang mampu mengoperasikan dengan baik, dengan harapan mempercepat proses bekerja para penyuluh KB sehingga aplikasi

kegiatan baik dari segi administrasi maupun pelaporan dapat dilaksanakan secara cepat dan tepat waktu.

2.2.3. Sumber Daya Lainnya

Adapun sumber daya yang mendukung kinerja pegawai Dinas PPKB dan dibantu oleh beberapa fasilitas kesehatan antara lain sebagai berikut :

Tabel 2.3

Tabel Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Melayani KB

NO	KECAMATAN	KETERANGAN
1	BAGOR	3 Faskes
2	BARON	1 Faskes
3	BERBEK	1 Faskes
4	GONDANG	2 Faskes
5	JATIKALEN	1 Faskes
6	KERTOSONO	4 Faskes
7	LENGKONG	2 Faskes
8	LOCERET	1 Faskes
9	NGANJUK	7 Faskes
10	NGETOS	1 Faskes
11	NGLUYU	1 Faskes
12	NGRONGGOT	1 Faskes
13	PACE	2 Faskes
14	PATIANROWO	1 Faskes
15	PRAMBON	2 Faskes
16	REJOSO	2 Faskes
17	SAWAHAN	2 Faskes
18	SUKOMORO	1 Faskes
19	TANJUNGANOM	1 Faskes
20	WILANGAN	1 Faskes
JUMLAH		37 Faskes

Tabel 2.4

Tabel Nama dan Alamat Fasilitas Kesehatan yang Melayani KB

NO	KECAMATAN	NAMA FASKES	ALAMAT
1	BAGOR	Puskesmas	Desa Petak
2	BAGOR	Klinik Shafira	Desa Selorejo
3	BAGOR	Sahabat Keluarga	Jl. Raya Madiun - Kedondong
4	BARON	Puskesmas	Desa Baron
5	BERBEK	Puskesmas	Jl. Supeno Berbek
6	GONDANG	Puskesmas	Jl. Pahlawan No. 90
7	GONDANG	ADI AMERTA	Jl. Raya Balonggebang - Lengkong
8	JATIKALEN	Puskesmas	Desa Jatikalen
9	KERTOSONO	Puskesmas	Jl. Anosopati Kertosono
10	KERTOSONO	RSUD	Kertosono
11	KERTOSONO	KKB Satiti	Jl. Langsep No. 3 Kertosono
12	KERTOSONO	PKU Muhammadiyah	Jl. Raya Lambang Kuning Kertosono
13	LENGKONG	Puskesmas	Desa Lengkong
14	LOCERET	Puskesmas	Desa Loceret
15	LOCERET	Klinik Pratama Rawat Inap "SHIFA HUSADA"	Desa Nglaban Kec. Loceret
16	NGANJUK	Puskesmas	Jl. Musi III No. 63 Nganjuk
17	NGANJUK	Poli KB RS (PKBRS)	Jl. Dr. Sutomo No 62 Nganjuk
18	NGANJUK	Rumah Sakit Islam	Jl. Imam Bonjol No. 2 A Nganjuk
19	NGANJUK	RS. Bhayangkara	Nganjuk
20	NGANJUK	Poskes 05.10.06	Jl. Panglima Sudirman Nganjuk
21	NGANJUK	Klinik Polres	Jl Gatot Subroto No 116 Nganjuk
22	NGETOS	Puskesmas	Desa Ngetos
23	NGLUYU	Puskesmas	Desa Ngluyu
24	NGRONGGOT	Puskesmas	Desa Ngronggot
25	PACE	Puskesmas	Desa Cerme Kec. Pace
26	PACE	FIFA HUSADA	Jl. Raya Kediri - Nganjuk
27	PATIANROWO	Puskesmas	Jl Raya Ngepung Patianrowo
28	PRAMBON	Puskesmas	Desa Sanggrahan - Prambon
29	PRAMBON	Flamboyan	Desa Sanggrahan - Prambon
30	REJOSO	Puskesmas	Desa Rejoso
31	REJOSO	Klinik Keluarga Kita	Jl Bojonegoro - Talang Rejoso
32	SAWAHAN	Puskesmas	Desa Sidorejo
33	SAWAHAN	Rawat Inap Alma Regina	Jl. Rejoso No 66 Sidorejo
34	SUKOMORO	Puskesmas	Kel Sukomoro
35	TANJUNGANOM	Puskesmas	Tanjunganom
36	WILANGAN	Puskesmas	Desa Mancon

Dinas PPKB Kab. Nganjuk bekerja sama dengan beberapa rumah sakit pemerintah maupun swasta yang ditunjuk oleh Pemerintah untuk melakukan pelayanan KB. Tabel diatas menjelaskan tentang gambaran sebaran fasilitas kesehatan yang membantu dalam proses pelayanan Keluarga Berencana (KB) yang ada di Kabupaten Nganjuk. Pelayanan yang dapat dilayani oleh pihak rumah sakit adalah untuk pelayanan Medis Operasi Pria dan Medis Operasi Wanita. Sedangkan pada faskes melayani dalam hal pemasangan IUD, implan dan suntik. Secara data dapat dijelaskan bahwa Jumlah fasilitas kesehatan sudah cukup memadai untuk melakukan pelayanan KB. Disamping Faskes diatas, ada salah satu Fasilitas kesehatan mobile yang disebut dengan Mobil pelayanan KB (Muyan KB). Pelayanan KB dengan Mobil Pelayanan KB sering melakukan pelayanan secara rutin ke beberapa Kecamatan dan Desa di Kabupaten Nganjuk.

Tabel 2.5

Tabel Jumlah PPKBD dan Sub PPKBD

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KADER		JUMLAH KADER
			PPKBD	SUB PPKBD	
1	BAGOR	21	25	240	265
2	BARON	11	11	260	271
3	BERBEK	19	19	255	274
4	GONDANG	17	17	199	216
5	JATIKALEN	11	11	139	150
6	KERTOSONO	14	14	198	212
7	LENGKONG	16	16	144	160
8	LOCERET	22	22	344	366
9	NGANJUK	15	15	447	462
10	NGETOS	9	9	127	136
11	NGLUYU	6	7	62	69
12	NGRONGGOT	13	13	243	256
13	PACE	18	19	452	471
14	PATIANROWO	11	11	164	175

NO	KECAMATAN	JUMLAH DESA	JUMLAH KADER		JUMLAH KADER
			PPKBD	SUB PPKBD	
15	PRAMBON	14	16	234	250
16	REJOSO	24	24	291	315
17	SAWAHAN	9	10	329	339
18	SUKOMORO	12	12	166	178
19	TANJUNGANOM	16	16	539	555
20	WILANGAN	6	6	128	134
JUMLAH		284	293	4.961	5.254

Peran Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (PPKBD) dan Sub Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa (Sub PPKBD) adalah seseorang atau beberapa orang kader dalam wadah organisasi yang secara sukarela berperan aktif melaksanakan/mengelola program Keluarga Berencana (KB) di tingkat desa/kelurahan.

2.3. Kinerja Pelayanan Dinas PPKB

Pada Lima tahun terakhir ini, Dinas PPKB telah melakukan perbaikan dari sisi bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Pencapaian tersebut dapat kita lihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.6

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas PPKB TA. 2014-2018

NO	Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Indikator lainnya	TARGET RENSTRA PERANGKAT DAERAH TAHUN					REALISASI CAPAIAN TAHUN					RASIO CAPAIAN PADA TAHUN				
					2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Prosentase capaian peserta KB aktif				100,00	100,00	100,00	80,00	80,00	79,78	79,65	78,07	78,15	77,32	79,78	79,65	78,07	97,69	96,6
2	Prosentase usia nikah pertama di bawah usia 20 tahun				14,00	13,96	13,92	13,88	13,84	10,70	11,42	12,01	12,51	11,81	130,78	122,29	115,89	110,95	117,19
3	Prosentase pasangan usia subur yang seharusnya KB tapi belum KB (Unmeet Need)				12,90	12,88	12,86	12,84	12,82	11,94	11,83	13,26	11,01	10,20	108,02	108,86	96,97	116,62	125,69
4	Prosentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber-KB				80,62	80,64	80,66	80,68	80,70	85,31	81,37	84,59	87,75	86,95	105,82	100,91	104,87	108,76	107,74
5	Total Fertility Rate (TFR)				-	-	-	2,13	2,13	-	-	2,13	2,02	2,00	-	-	-	105,45	106,50

Berdasarkan tabel diatas dapat disimpulkan bahwa pada setiap tahunnya mulai dari tahun 2014 s/d 2018 Dinas PPKB tengah mengalami perbaikan dari segi pelaksanaan program Pengendalian Penduduk dan keluarga Berencana. Diharapkan untuk tahun -tahun yang akan datang dapat lebih meningkatkan kinerja demi memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat.

Tabel 2.7

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas PPKB Kab. Nganjuk

2.4. Tantangan dan Peluang

2.4.1. Tantangan

Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk mempunyai tantangan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Adapun tantangan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Kurangnya tenaga Penyuluh Keluarga Berencana dibandingkan dengan luas wilayah kerja
2. Belum Semua PUS mengetahui dan sadar akan hak-hak reproduksinya dan berperilaku positif dalam kesehatan reproduksinya
3. Mempertahankan laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Nganjuk
4. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata
5. Pemenuhan kebutuhan kelompok kesehatan reproduksi remaja bagi remaja di luar sekolah
6. Tingkat partisipasi KB pria masih rendah
7. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kurang menyentuh dalam masyarakat pedesaan
8. Pasangan usia subur tidak ber KB yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda perlu pembinaan menjadi peserta KB
9. Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal
10. Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, masih perlu peningkatan peran kelompok dalam masyarakat
11. Perlunya penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB termasuk penguatan data dan informasi kependudukan dan KB bersama stake holder/ seluruh elemen masyarakat
12. Data kependudukan (data migrasi masuk, data migrasi keluar, jumlah kelahiran, jumlah kematian) masih sangat tergantung pada ketersediaan data lintas sektor

2.4.2. Peluang

Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk mempunyai peluang yang cukup besar untuk meningkatkan kualitas pelayanan dibidang pengendalian penduduk dan Keluarga Berencana. Adapun peluang yang muncul adalah sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas teknis dan peran stakeholder dalam rangka advokasi dan sosialisasi program keluarga berencana dan ketahanan keluarga
2. Komitmen mitra kerja yang cukup baik dalam mendukung kebijakan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
3. Komitmen Pimpinan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
4. Peningkatan ketahanan keluarga dan kesejahteraan keluarga menjadi perhatian beberapa OPD.

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS DINAS PPKB

Kondisi riil saat ini yang terjadi di wilayah Kabupaten Nganjuk, khususnya berkaitan dengan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana merupakan hal yang harus diperhitungkan di dalam menyusun Rencana Strategis Dinas PPKB Kab. Nganjuk Tahun 2018-2023. Adapun permasalahan yang dapat dijabarkan adalah sebagai berikut :

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas PPKB

- a. Pengetahuan masyarakat terhadap kesehatan reproduksi belum merata. Dari sebanyak 130 Pusat Informasi dan Konseling Remaja yang terbentuk, hanya 68 atau 52,31% yang aktif dan sisanya sebanyak 62 atau 47,69% tidak aktif.
- b. Tingkat partisipasi KB pria masih rendah. Jumlah pasangan usia subur (PUS) selama 3 tahun terakhir menunjukkan penurunan. Tahun 2017 jumlah PUS sebanyak 203.739 pasang, sedangkan tahun 2016 sebanyak 204.815 pasangan dan tahun 2015 sudah sebesar 105.145 PUS.
- c. Petugas Keluarga Berencana (KB) masih kurang. Jumlah Petugas KB sebanyak 82 orang. Jumlah ini masih jauh dari ideal, sebab dengan jumlah desa 284 desa dan rasio ideal 1 orang petugas membawahi 2 desa, maka dibutuhkan sebanyak 142 petugas. Kekurangan petugas KB sebanyak 60 petugas.
- d. Pengembangan advokasi dan komunikasi, informasi dan edukasi (KIE) kurang menyentuh dalam masyarakat pedesaan. Hal ini ditunjukkan dengan prosentase jumlah perkawinan dibawah usia 20 tahun masih tinggi terus meningkat selama 3 tahun terakhir. Usia kawin pertama rata-rata 19 tahun. Tahun 2017 sebanyak 8.463 perkawinan terdapat 1.059 atau 12,51% perkawinan yang masih dibawah umur 20 tahun. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2016 yang hanya 12,01%.
- e. Pasangan usia subur tidak ber-KB yang tidak ingin anak lagi dan ingin anak ditunda perlu pembinaan menjadi peserta KB. Jumlah ini masih cukup tinggi yaitu tahun 2017 sebanyak 22.435 PUS dari 203.739, meski jumlahnya terus menurun dimana tahun 2016 sebanyak 22.694 PUS.

- f. Pemberdayaan ekonomi keluarga, khususnya melalui kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) belum optimal. Jumlah UPPKS tahun 2017 sebanyak 183 kelompok, dan dari jumlah tersebut masih ada 26 kelompok yang tidak aktif.
- g. Pengembangan ketahanan dan peningkatan kualitas lingkungan keluarga, masih perlu peningkatan peran kelompok dalam masyarakat. Dilihat dari jumlah pembinaan pada kelompok kegiatan Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Bina Keluarga Lansia (BKL), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK R) dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS). Tahun 2017 hanya terdapat 49 Kampung KB dan dari jumlah tersebut hanya 34 kelompok kegiatan yang ada.
- h. Perlunya penguatan tata kelola pembangunan kependudukan dan KB termasuk penguatan data dan informasi kependudukan dan KB bersama stake holder/ seluruh elemen masyarakat.
- i. Data kependudukan (data migrasi masuk, data migrasi keluar, jumlah kelahiran, jumlah kematian) masih sangat tergantung pada ketersediaan data lintas sektor.
- j. Masih tingginya ASFR (kelahiran pada kelompok umur 15-19 th) sebesar 50,40 diatas target nasional sebesar 28.
- k. Metode kontrasepsi jangka panjang masih rendah s/d bulan Oktober 2018 yaitu 48.922 (24,01%) akseptor KB MKPJ dari 203.739 PUS

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

3.2.1 Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Sesuai dengan Visi Kabupaten : “**TERWUJUDNYA KABUPATEN NGANJUK YANG MAJU DAN BERMARTABAT (NGANJUK NYAWIJI BANGUN DESO NOTO KUTHO)**” dan diteruskan menjadi misi ke – 3 yaitu “**Meningkatkan kualitas, pelayanan dan mutu pendidikan dan kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas**”.

Berdasarkan visi dan misi diatas, tugas pokok dan fungsi Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk adalah menyelenggarakan pelayanan Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Keluarga. Dengan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan KB dan mutu kesehatan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang

berkualitas. Untuk itu diperlukan evaluasi yang berkaitan dengan Pelayanan Keluarga Berencana secara berkala.

3.3. Telaahan Renstra Kementerian/ Lembaga dan Renstra Perangkat Daerah Provinsi Jawa Timur

3.3.1 Renstra BKKBN Tahun 2015-2019

Sesuai dengan arah kebijakan Pemerintah (Kabinet Kerja) 2015-2019, seluruh Kementerian/Lembaga diarahkan untuk turut serta mensukseskan Visi dan Misi Pembangunan 2015-2019, dimana Visi Pemerintah untuk 5 (lima) tahun kedepan adalah untuk mewujudkan “Indonesia yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong” dengan misi: 1) Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, 2) Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan dan demokratis berlandaskan Negara Hukum, 3) Mewujudkan politik luar negeri bebas aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, 4) Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju dan sejahtera, 5) Mewujudkan Indonesia yang berdaya saing, 6) Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan 7) Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Visi dan Misi Pembangunan tersebut di dukung oleh 9 (sembilan) Agenda Prioritas Pembangunan (Nawa Cita), BKKBN diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan Agenda Prioritas ke 5 (lima), untuk “Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia Indonesia”, terlihat dalam visi BKKBN yaitu **“menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh seimbang dan keluarga berkualitas”**.

Salah satu prioritas pembangunan nasional di dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2010-2025 adalah mewujudkan penduduk tumbuh seimbang. Sehingga BKKBN berkomitmen akan turut mensukseskan Agenda Prioritas No.5 (didalam Nawa Cita), untuk mendukung peningkatan kualitas hidup manusia Indonesia **“dengan menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan Penduduk Tumbuh**

Seimbang dan Keluarga Berkualitas”, pertumbuhan penduduk yang seimbang dan keluarga berkualitas ditandai dengan menurunnya Total Fertility Rate (TFR) menjadi 2,1 dan Net Reproductive Rate (NRR) = 1 pada tahun 2025, serta keluarga berkualitas ditandai dengan keluarga yang terbentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri dan memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Dalam mendukung upaya perwujudan visi pembangunan 2015-2019 diatas, BKKBN memiliki misi:

1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan
2. Menyelenggarakan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi
3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga
4. Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga
5. Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten

Berdasarkan ketentuan pasal 56 ayat (2) Undang - Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, dan ketentuan Lampiran huruf (n) Undang - undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, BKKBN mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di bidang pengendalian penduduk dan KB. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ketentuan tersebut, BKKBN menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan nasional, pepaduan dan sinkronisasi kebijakan di bidang KKB;
- b. Penetapan Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria di bidang KKB;
- c. Pelaksanaan advokasi dan koordinasi di bidang pengendalian penduduk dan KB;
- d. Penyelenggaraan komunikasi, informasi, dan edukasi di bidang KKB;
- e. Penetapan perkiraan pengendalian penduduk secara nasional;

- f. Penyusunan desain Program KKBPK;
 - g. Pengelolaan tenaga penyuluh KB/petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 - h. Pengelolaan dan penyediaan alat dan obat kontrasepsi untuk kebutuhan PUS nasional;
 - i. Pengelolaan dan pengendalian sistem informasi keluarga;
 - j. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pengendalian pelayanan dan pembinaan kesertaan ber-KB dan Kesehatan Reproduksi (KR);
 - k. Pengembangan desain program pembangunan keluarga melalui pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - l. Pemberdayaan dan peningkatan peran serta organisasi kemasyarakatan tingkat nasional dalam pembangunan keluarga melalui ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
 - m. Standardisasi pelayanan KB dan sertifikasi tenaga penyuluh KB/ petugas lapangan KB (PKB/PLKB);
 - n. penyelenggaraan pemantauan dan evaluasi di bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
 - o. Pembinaan, pembimbingan, dan fasilitasi di bidang KKB.
- Selain fungsi tersebut BKKBN juga menyelenggarakan fungsi:
1. penyelenggaraan pelatihan, penelitian, dan pengembangan di bidang KKB;
 2. Pembinaan dan koordinasi pelaksanaan tugas administrasi umum di lingkungan BKKBN;
 3. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab BKKBN;
 4. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan BKKBN;
 5. Penyampaian laporan, saran, dan pertimbangan di bidang KKB.

3.3.2 Renstra Perwakilan BKKBN Provinsi Jawa Timur Tahun 2015-2019

VISI	MISI
Menjadi lembaga yang handal dan dipercaya dalam mewujudkan penduduk tumbuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengarusutamakan Pembangunan Berwawasan Kependudukan 2. Menyelenggarakan Keluarga

seimbang dan keluarga berkualitas	<p>Berencana dan Kesehatan Reproduksi</p> <p>3. Memfasilitasi Pembangunan Keluarga</p> <p>4. Mengembangkan jejaring Kemitraan dalam pengelolaan Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga</p> <p>5. Membangun dan menerapkan Budaya Kerja Organisasi secara konsisten</p>
-----------------------------------	---

Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023

VISI	MISI
Terwujudnya Penduduk yang seimbang melalui KB	Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Pelayanan KB

Berdasarkan bagan diatas, dapat kita lihat bahwa mulai dari visi dan misi pusat sampai dengan visi dan misi pada Dinas PPKB Kab. Nganjuk sudah terintegrasi dan berjalan secara sinergi. Dengan adanya sinergitas antara visi dan misi pusat dan daerah, maka diharapkan dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melakukan perencanaan program dan kegiatan yang ada di daerah. Sehingga strategi, arah kebijakan, sasaran yang akan dicapai, program dan kegiatan dapat bersinergi dengan kebijakan dari pemerintah pusat.

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Nganjuk, arah kebijakan Dinas PPKB untuk tahun-tahun yang akan datang adalah Meningkatkan KB yang berkualitas untuk menghasilkan sumber daya manusia yang berkualitas. Pembangunan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana diarahkan pada peningkatan pelayanan

keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang terjangkau, bermutu dan efektif menuju terbentuknya norma keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Di samping itu, penataan persebaran dan mobilitas penduduk diarahkan menuju persebaran penduduk yang lebih seimbang sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan melalui pemerataan pembangunan ekonomi dan daerah pengirim maupun penerima dengan memperhatikan keragaman etnis dan budaya serta pembangunan berkelanjutan. Sistem administrasi kependudukan penting pula dilakukan untuk mendukung perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di tingkat nasional dan daerah serta mendorong terakomodasinya hak penduduk dan perlindungan sosial.

Disamping itu, peran penting dalam pengukuran program yang ada di Dinas PPKB adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
 - Prosentase Pasangan Usia Subur yang seharusnya KB tapi belum KB (Unmeet Need)
 - Rasio Petugas Pembantu Desa (PPKBD)/ Sub PPKBD di setiap desa/ kelurahan
2. Program Keluarga Berencana
 - Prosentase Penggunaan Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)
 - Cakupan ketersediaan dan distribusi alat dan obat kontrasepsi untuk memenuhi permintaan masyarakat
 - Prosentase capaian peserta KB baru
3. Program Ketahanan Keluarga
 - Prosentase anggota Bina Keluarga Balita (BKB) yang ber- KB
 - Prosentase anggota Bina Keluarga Remaja (BKR) yang ber- KB
 - Prosentase anggota Bina Keluarga Lansia (BKL) yang ber- KB
 - Prosentase akseptor KB yang menjadi anggota UPPKS

Berdasarkan penjelasan dan pengukuran diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pengukuran tersebut dapat dijadikan sebagai acuan dalam perencanaan program dan kegiatan serta pelayanan di masyarakat. Dengan begitu dapat memotivasi Dinas PPKB untuk selalu meningkatkan fasilitasi terhadap pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera di masyarakat.

3.3. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Rencana Tata ruang wilayah dan kajian lingkungan hidup strategis (RTRW dan KLHS) merupakan sebuah kajian dan wacana yang diberikan kepada para pemangku kebijakan guna menentukan kebijakan-kebijakan serta program-program pembangunan yang berorientasi kepada konsep tata ruang dan tata wilayah serta memperhatikan lingkungan sekitar. Oleh sebab itu telaahan RTRW dan KLHS dalam menunjang perencanaan pembangunan sangat diperlukan.

Sebagaimana yang disebutkan dalam nawa cita program Jokowi-JK yaitu meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia kemudian di perjelas dalam Program Nasional KKB di daerah tertinggal, terpencil dan terbatas (Galccitas) dan di daerah kumuh miskin, pada bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan bidang ini difokuskan pada upaya penggerakan akseptor untuk mengikuti dan mensukseskan program KB.

Pada bidang keluarga berencana, difokuskan pada upaya peningkatan kualitas pelayanan KB dan perluasan jangkauan dengan mendorong pasangan usia subur (PUS) memakai metode kontrasepsi jangka panjang (MKJP). Penggarapan KB di **wilayah pedesaan** yang sulit terjangkau sifatnya wajib karena memberikan keadilan bagi warga masyarakat untuk mendapatkan pelayanan yang sama dengan masyarakat pada wilayah lainnya. Hal tersebut membuktikan bahwa adanya upaya maksimal dari pemerintah pusat dan daerah dalam upaya pemerataan pelayanan KB.

Sedangkan pada bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluargadiupayakan Pasangan Usia Subur (PUS) untuk tetap menjadi peserta KB aktif dan bisa meningkatkan ekonomi keluarga melalui kegiatan Pemberdayaan kelompok usaha peningkatan pendapatan keluarga sejahtera (UPPKS) melalui gerakan industri keluarga (Gerinda), BKB, BKR dan BKL yang bekerja sama dengan lintas sektor (*Dinas Sosial dan Dinas Perindustrian dan Perdagangan*)serta berupaya mensosialisasikan program KB melalui GenRe Generasi Berencana yang bekerjasama dengan *Dinas Pendidikan* dengan tujuan untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja dalam hal jenjang pendidikan yang terencana, berkarir dalam pekerjaan yang

terencana, menikah dengan perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Adapun Faktor penghambat dan pendukung berdasarkan Tata Ruang dan KLHS adalah sebagai berikut :

Faktor Penghambat :

1. Di daerah Nganjuk masih terdapat daerah pedesaan yang sulit terjangkau yang berdampak pada pelayanan KB sehingga belum dapat dilaksanakan secara optimal.
2. Masih rendahnya sosialisasi RTRW dan KLHS.
3. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya RTRW dan KLHS.
4. Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Faktor Pendukung :

1. Wilayah Kabupaten Nganjuk dengan jumlah desa sebanyak 284 desa/ kelurahan dan masih sarat dengan kultur rasa gotong royong dan kepedulian yang masih tinggi, membuat masyarakat berkenan untuk turun tangan guna membantu petugas dalam melakukan sosialisasi program pengendalian penduduk dan keluarga berencana kepada masyarakat.
2. Masih banyaknya wilayah pedesaan di Kabupaten Nganjuk, membuat ciri khas masyarakat desa yang memiliki rasa toleransi yang tinggi dan kekerabatan yang baik dengan orang di sekitar masih sangat kental.

Maka dapat disimpulkan bahwa jumlah desa/kelurahan yang cukup banyak, membuat pelayanan keluarga berencana dan keluarga sejahtera masih sulit untuk dilakukan dengan baik. Salah satu penyebabnya antara lain daerah yang sulit sekali untuk dijangkau dan juga jumlah PLKB/PKB yang sangat terbatas jumlahnya.

3.4. Penentuan Isu-isu Strategis

Meski sudah banyak capaian dan potensi yang dimiliki dalam mendukung terwujudnya program kependudukan serta keluarga berencana namun di berbagai bidang masih belum optimal. Isu yang sedang berkembang berasal dari substansi dan implikasi berkaitan dengan tema yang sedang terjadi, sedang dalam proses, sedang hangat dibicarakan dalam masyarakat atau diperkirakan muncul dalam waktu dekat.

Dari beberapa masalah yang ada pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk dalam 5 tahun (2019 - 2023) mendatang terdapat beberapa faktor yang berpengaruh terhadap pelayanan tugas dan fungsi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Beberapa isu strategis dalam pelayanan Dinas Pengendalian Penduduk dan KB Kabupaten Nganjuk yang menjadi skala prioritas adalah sebagai berikut :

1. Dukungan kebijakan pemerintah daerah untuk menekan kasus kelahiran perempuan dibawah usia 21 tahun.
2. Kesadaran masyarakat untuk mengendalikan kelahiran semakin meningkat.
3. Dukungan pemerintah dan peran masyarakat dalam menekan unmeet need semakin kuat.

Untuk memperoleh informasi apa saja yang menjadi isu strategis yang akan ditangani melalui renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana digunakan kriteria penentuan sebagai berikut:

1. Memiliki pengaruh yang besar / signifikan terhadap pencapaian sasaran renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan KB.
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab OPD.
3. Dampak yang ditimbulkannya terhadap publik.
4. Memiliki daya ungkit untuk pembangunan daerah.

Berdasarkan isu strategis inilah yang selanjutnya akan melandasi penetapan program prioritas kegiatan, tujuan, sasaran dan target kinerja yang akan di capai melalui Rencana strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 – 2023.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. Tujuan Jangka Menengah Dinas PPKB

Berlandaskan hasil visi dan misi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Nganjuk yang telah disusun berdasarkan target capaian setiap tahunnya maka perlu adanya Renstra Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Nganjuk sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nganjuk yang berkepentingan untuk memberikan kontribusi terhadap upaya pemecahan permasalahan yang berkaitan dengan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pemerintah Kabupaten Nganjuk harus menetapkan kebijakan dan memberikan peluang yang seluas - luasnya bagi penduduk untuk membentuk jati dirinya secara profesional dan bertanggung jawab dengan memperluas aksesibilitas, memperkuat partisipasi kontrol, dalam pengambilan keputusan, serta memberikan ruang seluas - luasnya untuk mengenyam manfaat pembangunan dari seluruh aspek kehidupan.

Secara konsektual visi dan misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana senantiasa bermuara kepada tercapainya Pengendalian penduduk dan keluarga berencana dalam kehidupan keluarga, masyarakat, berbangsa dan bernegara dan sejalan dengan visi Pemerintah Kabupaten Nganjuk sebagai simpul jejaring akselerasi kesejahteraan masyarakat. Visi dan Misi Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana juga di dukung oleh 9 (sembilan) agenda prioritas pembangunan (nawa cita) dimana Dinas Pengendalian Penduduk & KB diharapkan dapat berpartisipasi dalam mensukseskan agenda prioritas ke 5 (lima) untuk “ Meningkatkan kualitas hidup manusia indonesia ” melalui pembangunan penduduk dan keluarga berencana.

Tujuan yang ingin dicapai melalui penentuan visi dan misi tersebut adalah :

Dari Misi “Meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan KB” dijabarkan ke dalam tujuan “Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk”

4.2. **Sasaran**

Dari tujuan yang telah ditentukan, kemudian dijabarkan dalam bentuk sasaran yang mudah terukur dengan rumusan-rumusan indikator sasaran yang telah ditetapkan sebagai berikut :

Tujuan “Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk”.
Dijabarkan dalam sasaran “Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas”

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas PPKB Kab. Nganjuk

NO.	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	DATA CAPAIAN TAHUN AWAL	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET TAHUN AWAL	TARGET				
			2018	2023			2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	Laju Pertumbuhan Penduduk	2,00	2,00	1 Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas	1 Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	2,13	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00
			77,32	80,04		2 Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	80,00	80,00	80,01	80,02	80,03	80,04
			11,81	11,20		3 Prosentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun	13,88	11,60	11,50	11,40	11,30	11,20

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN DINAS PPKB

5.1. Strategi Dinas PPKB Kab. Nganjuk

Strategi pembangunan ini diarahkan sebagai upaya pengendalian kuantitas penduduk melalui keluarga berencana, serta pengembangan dan peningkatan kualitas penduduk melalui perwujudan keluarga kecil yang berkualitas. Adapun strategi tersebut adalah sebagai berikut :

1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan :
 - a. Pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk
 - b. Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal atau melalui poktan
 - c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam melakukan analisis/kajian kebijakan, sosialisasi dan advokasi
 - d. Memanfaatkan berbagai media dan sarana untuk melakukan advokasi
 - e. Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan pembangunan keluarga
 - f. Peningkatan komitmen, stakeholders tentang pengendalian penduduk
 - g. Menguatnya kelembagaan pembangunan bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK)
 - h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga.
 - i. Pengembangan dan pelaksanaan sub sistem pencatatan dan pelaporan diarahkan untuk data dan informasi yang cepat, lengkap dan akurat yang berbasis teknologi melalui :
 - Pembakuan sub sistem pencatatan dan pelaporan
 - Operasional pengumpulan data secara cepat, lengkap dan akurat
 - Penyusunan dan penyajian data laporan secara teratur
2. Bidang Keluarga Berencana
 - a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP
 - b. Peningkatan kesertan KB Pria
 - c. Peningkatan kualitas melalui penguatan tenaga dan fasilitas pelayanan KB statis dan dinamis di Faskes KB pemerintah dan swasta

- d. Peningkatan akses pelayanan KB minimal 1 desa terdapat 1 Faskes KB
- e. Ketersediaan alokon di masing-masing faskes Pemerintah dan Swasta
- f. Peningkatan peserta KB baru bagi penerima manfaat BPJS (Peserta KB pasca persalinan/pasca keguguran) atau sumber jaminan pembiayaan lainnya.
- g. Peningkatan kesertaan KB baru pasca persalinan dan keguguran di RS baik Pemerintah maupun Swasta
- h. Peningkatan pelayanan KB terhadap unmet need (PUS belum KB)
- i. Perluasan jejaring kemitraan adanya Komite KB Mandiri, melalui masyarakat peduli KB.
- j. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak (KHIBA) melalui KB.
- k. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling pencegahan IMS, HIV dan AIDS (kondom dual protection), KAR, pelayanan IUD plus Papsmear/IVA dan penanggulangan infertilitas sekunder
- l. Pelayanan KB Medis Operasi melalui interfal di Rumah Sakit yang sudah bekerjasama dengan BPJS.

Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :

- a. Mempertajam segmentasi sasaran kelompok Tribina, UPPKS dan PIK-R
- b. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan sampai pada tahap realisasi program
- c. Memfasilitasi, monitoring dan evaluasi program yang mengarah pada pencapaian sasaran
- d. Meningkatkan pemahaman secara menyeluruh pada remaja terkait dengan program generasi berencana
- e. Pendewasaan Usia Perkawinan
- f. Meningkatkan pemahaman orang tua tentang fungsi keluarga dan pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera
- g. Meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga
- h. Memfasilitasi integrasi lintas sektor program KKBPK di Kampung KB.

5.2. **Arah Kebijakan**

Strategi yang dijelaskan sebelumnya merupakan upaya serius yang akan dilakukan oleh Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dalam menjuang program pemerintah pusat maupun daerah. Strategi yang tertuang tersebut merupakan runtutan secara teknis dari arah kebijakan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk dalam merumuskan program dan kegiatan bidang Keluarga Berencana, Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan, dan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga.

Adapun arah kebijakan Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk :

- a. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk ditekankan pada :
 1. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas
 2. Penyediaan data parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait
 3. Pemanfaatan parameter kependudukan oleh pemangku kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan
 4. Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah
- b. Revitalisasi program KB :
 1. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB
 2. Promosi dan Penggerakan masyarakat untuk turut serta dalam program KKB
 3. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk
 4. Peningkatan pemanfaatan SIM berbasis teknologi informasi
 5. Pelatihan penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB
 6. Peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan
 7. Penurunan angka kelahiran (TFR)
 8. Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)
- c. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga ditekankan pada :
 1. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen yang mendukung pencapaian target kelompok
 2. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga
 3. Meningkatkan koordinasi dengan program-program lain untuk menunjang peningkatan ketahanan keluarga

4. Merevitalisasi program-program terpadu lintas sektor di tingkat lini lapangan untuk menunjang program

5.3. **Kebijakan Umum Pembangunan Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Berdasarkan Penjelasan sebelumnya maka dapat dirumuskan bersama tentang kebijakan umum pembangunan untuk bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Berikut adalah kebijakan umum pembangunan bidang pengendalian penduduk dan keluarga berencana Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 :

1. Meningkatkan kualitas keluarga melalui peningkatan akses pelayanan KB kepada masyarakat
2. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan instansi terkait
3. Meningkatkan kualitas dan kuantitas Pelayanan KB sesuai standar SOP
4. Meningkatkan kesertaan ber KB
5. Meningkatkan kualitas petugas KB
6. Penguatan program pembangunan keluarga berkualitas
7. Sosialisasi Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) yang bekerjasama dengan Kemenag dan Dinas Pendidikan

Tabel 5.1
Strategi dan Arah kebijakan
Dinas PPKB Kab. Nganjuk

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
1.	Meningkatnya pengendalian pertumbuhan penduduk	1. Terwujudnya Keluarga Berencana yang berkualitas	1. Bidang Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan : <ul style="list-style-type: none"> a. Pengendalian kuantitas dan kualitas penduduk b. Peningkatan pelaksanaan pendidikan kependudukan melalui jalur formal, non formal dan informal atau melalui poktan c. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan mitra kerja dalam melakukan analisis/kajian kebijakan, sosialisasi dan advokasi d. Memanfaatkan berbagai media dan sarana untuk melakukan advokasi e. Penguatan sistem pengelolaan data dan informasi Kependudukan, Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga f. Peningkatan komitmen, stakeholders tentang kependudukan g. Menguatnya kelembagaan pembangunan bidang kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga (KKBPK) h. Meningkatkan kuantitas dan kualitas data dan informasi kependudukan, keluarga berencana dan pembangunan keluarga i. Pengembangan dan pelaksanaan sub sistem pencatatan dan pelaporan diarahkan untuk data dan informasi yang cepat, lengkap dan akurat yang berbasis teknologi melalui : <ul style="list-style-type: none"> - Pembakuan sub sistem pencatatan dan pelaporan - Operasional pengumpulan data secara cepat, lengkap dan akurat - Penyusunan dan penyajian data laporan secara teratur 	1. Penyerasian kebijakan pengendalian penduduk ditekankan pada : <ul style="list-style-type: none"> a. Perumusan kebijakan kependudukan yang sinergis dan harmonis antara aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas b. Penyediaan data parameter kependudukan yang disepakati semua sektor terkait c. Pemanfaatan parameter kependudukan oleh pemangku kepentingan untuk penyusunan perencanaan pembangunan d. Sinkronisasi kebijakan pembangunan kependudukan antara pusat dan daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			<p>2. Bidang Keluarga Berencana :</p> <p>a. Intensifikasi dan ekstensifikasi pelayanan KB MKJP</p> <p>b. Peningkatan kesertan KB Pria</p> <p>c. Peningkatan kualitas melalui penguatan tenaga dan fasilitas pelayanan KB statis dan dinamis di Faskes KB pemerintah dan swasta</p> <p>d. Peningkatan akses pelayanan KB minimal 1 desa terdapat 1 Faskes KB</p> <p>e. Ketersediaan alokon di masing-masing faskes Pemerintah dan Swasta</p> <p>f. Peningkatan peserta KB baru bagi penerima manfaat BPJS (Peserta KB pasca persalinan/pasca keguguran) atau sumber jaminan pembiayaan lainnya</p> <p>g. Peningkatan kesertaan KB baru pasca persalinan dan keguguran di RS baik Pemerintah maupun Swasta</p> <p>h. Peningkatan pelayanan KB terhadap kelompok Unmet need (PUS belum KB)</p> <p>i. Perluasan jejaring kemitraan adanya Komite KB Mandiri, dan masyarakat peduli KB</p> <p>j. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling peningkatan kualitas kesehatan ibu, bayi dan anak(KHIBA) melalui KB</p> <p>k. Peningkatan sosialisasi, promosi dan konseling pencegahan IMS, HIV dan AIDS (kondom dual protection), KAR, pelayanan IUD plus Papsmea/IVA dan penanggulangan infertilitas sekunder</p> <p>3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :</p> <p>a. Mempertajam segmentasi sasaran kelompok Tribina dan UPPKS</p> <p>b. Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan sampai pada tahap realisasi program</p>	<p>2. Revitalisasi Program KB :</p> <p>a. Pembinaan dan peningkatan kesertaan dan kemandirian ber-KB</p> <p>b. Promosi dan Penggerakan masyarakat untuk turut serta dalam program KKB</p> <p>c. Pengembangan sosialisasi kebijakan pengendalian penduduk</p> <p>d. Peningkatan pemanfaatan SIM berbasis teknologi informasi</p> <p>e. Pelatihan penelitian dan pengembangan program kependudukan dan KB</p> <p>f. Peningkatan kualitas manajemen program dan kegiatan</p> <p>g. Penurunan angka kelahiran (TFR)</p> <p>h. Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS)</p> <p>3. Bidang Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga :</p> <p>a. Memaksimalkan advokasi dan penggalangan komitmen yang mendukung pencapaian target kelompok</p> <p>b. Meningkatkan dan memantapkan SDM pengelola program pemberdayaan ekonomi dan ketahanan keluarga</p>

NO	TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
1	2	3	4	5
			<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan pemahaman secara menyeluruh pada remaja terkait dengan program generasi berencana d. Pendewasaan Usia Perkawinan e. Meningkatkan pemahaman orang tua tentang fungsi keluarga dan pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera f. Meningkatkan pemahaman orang tua tentang fungsi keluarga dan pembangunan keluarga kecil bahagia sejahtera g. Memfasilitasi memajukan Kampung KB di Kec se - Kabupaten Nganjuk guna peningkatan akseptor KB MKJP 	<ul style="list-style-type: none"> c. Meningkatkan koordinasi dengan program-program lain untuk menunjang peningkatan ketahanan keluarga d. Merevitalisasi program-program terpadu lintas sektor di tingkat lini lapngan untuk menunjang program

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN

6.1. Rencana Program dan Kegiatan Urusan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Untuk mencapai sasaran **“Terwujudnya Keluarga Berencana yang Berkualitas”** ditetapkan program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana. Program ini bertujuan untuk meningkatkan akses pelayanan KB dan kesehatan reproduksi kepada masyarakat. Adapun program Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana adalah sebagai berikut :

1. Program Pengendalian Penduduk, Penyuluhan dan Penggerakan
2. Program Keluarga Berencana
3. Program Ketahanan Keluarga

Adapun rencana program & kegiatan, indikator program (outcome) dan indikator kegiatan (output) dapat kita pada tabel sebagai berikut :

Tabel 6.1
Rencana Program dan Kegiatan
Dinas PPKB Kab. Nganjuk

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PENGENDALIAN
PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA

Indikator kinerja pada dokumen ini terdiri atas indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja kunci (IKK)

7.1. Indikator Kinerja Utama (IKU)

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas PPKB Kab. Nganjuk

NO.	INDIKATOR	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RENSTRA	TARGET					KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RENSTRA
			TAHUN - 0 2018	TAHUN-1 2019	TAHUN-2 2020	TAHUN-3 2021	TAHUN-4 2022	TAHUN-5 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Total Fertility Rate (TFR)/ Angka Kelahiran Total	$TFR = 5 \sum_{i=1}^7 ASFR_i$	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	
2	Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi	$\frac{\text{Jumlah Peserta KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS)}} \times 100\%$	77,32	80,00	80,01	80,02	80,03	80,04	
3	Prosentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun	$\frac{\text{Jumlah Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun}}{\text{Jumlah Seluruh Perkawinan}} \times 100\%$	11,81	11,60	11,50	11,40	11,30	11,20	

Berdasarkan matrik yang tertera diatas, dapat dijelaskan bahwa apa yang muncul di dalam perencanaan kinerja Dinas PPKB merupakan hasil *review* dari isu-isu strategis terkait dengan urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, yang diakomodir dalam matrik indikator kinerja utama yang diukur pada setiap tahunnya. Dengan harapan apa yang akan dilakukan, sasaran dan targetnya dapat terpenuhi, sehingga cita-cita dari Dinas PPKB dapat terwujud.

Melihat beberapa indikator diatas dapat kita jabarkan bahwa untuk urusan pengendalian penduduk berfokus pada upaya menekan jumlah angka kelahiran melalui program KB dan untuk urusan keluarga berencana berfokus pada prevalensi pemakaian alat kontrasepsi. Indikator tersebut memberikan gambaran bahwa perencanaan kinerja yang dilaksanakan telah berbasis kepada isu strategis dan telah berbasis pada kinerja.

Berikut penjelasan tentang indikator kinerja pada urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana adalah sebagai berikut :

1. Angka Kelahiran Total/ *Total Fertility Rate* (TFR)

TFR adalah jumlah anak yang akan dimiliki seorang wanita selama masa reproduksinya per 1000 wanita dalam suatu wilayah kerja dalam kurun waktu tertentu. Asumsi yang digunakan yaitu tidak ada seorang perempuan pun yang meninggal sebelum mengakhiri masa reproduksinya dan tingkat fertilitas menurut umur tidak berubah pada periode waktu pengukuran. TFR adalah sebagai indikator untuk membandingkan keberhasilan antar wilayah dalam melaksanakan pembangunan sosial ekonomi, menunjukkan tingkat keberhasilan program KB, membantu para perencana program pembangunan untuk meningkatkan rata-rata usia kawin, meningkatkan program pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan pelayanan ibu hamil dan perawatan anak, serta mengembangkan program penurunan tingkat kelahiran.

2. Contraceptive Prevalence Rate (CPR)/ Angka Prevalensi Pemakaian Kontrasepsi atau Prosentase capaian peserta KB aktif adalah jumlah peserta KB aktif dibandingkan dengan jumlah pasangan usia subur di suatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu. Pengukuran tersebut sebagai bentuk upaya untuk mendukung capaian peserta KB aktif. Pengukuran tersebut juga menunjukkan adanya keikutsertaan masyarakat dalam program KB. Dengan harapan dapat melakukan kontrol capaian target terhadap penggunaan alat kontrasepsi di Kabupaten Nganjuk

3. Prosentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun

Prosentase Usia Nikah Pertama dibawah Usia 21 Tahun merupakan pengukuran yang difungsikan untuk mengetahui seberapa berhasil program pendewasaan usia perkawinan (PUP). Program ini juga menjadi tolok ukur atas keberhasilan dari program Generasi Berencana (GENRE). GenRe adalah program yang dikembangkan oleh Badan Kependudukan

dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) dengan kelompok sasaran program yaitu :

- Remaja berusia 10 – 24 tahun yang belum menikah
- Keluarga yang mempunyai anak remaja
- Masyarakat yang peduli terhadap kehidupan para remaja

Program Generasi Berencana bertujuan untuk menyiapkan kehidupan berkeluarga bagi para remaja dalam hal jenjang pendidikan yang terencana, berkarir dalam pekerjaan yang terencana, menikah dengan perencanaan sesuai siklus kesehatan reproduksi.

Sebagaimana slogan dari program GENRE yaitu “Katakan Tidak Pada Nikah Dini, Seks Pra Nikah dan NAPZA. Oleh sebab itulah pengukuran ini menjadi salah satu indikator yang menjadi perhatian dalam kesuksesan program keluarga berencana dan pemberdayaan keluarga.

7.2. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Sebagaimana yang sudah dijelaskan pada BAB sebelumnya, bahwa Indikator kinerja difungsikan sebagai alat ukur yang menggunakan ukuran kuantitatif atau kualitatif yang mengindikasikan pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah disepakati bersama. Adapun indikator Bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana mengukur 2 urusan yaitu urusan Pengendalian Penduduk dan urusan Keluarga Berencana. Adapun Indikator kinerja yang mengacu pada sasaran dan tujuan dapat kita lihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 7.2
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas PPKB Kab. Nganjuk

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
1	Cakupan Peserta KB Aktif	$\frac{\text{Jumlah Peserta Program KB Aktif}}{\text{Jumlah Pasangan Usia Subur}} \times 100\%$	Jumlah Peserta Program KB Aktif adalah PUS yang pada saat pendataan sedang memakai atau menggunakan salah satu alat/cara kontrasepsi modern. Dalam pengertian ini tidak termasuk cara-cara kontrasepsi tradisional, seperti pijat urut, jamu dan juga tidak termasuk cara-cara KB alamiah seperti pantang berkala, sanggama terputus dan sebagainya. Jumlah Pasangan Usia Subur (PUS) adalah Pasangan suami-istri yang istrinya berumur 15-49 tahun dan masih haid, atau pasangan suami-istri yang

NO	INDIKATOR KINERJA KUNCI	RUMUS PERHITUNGAN	KETERANGAN
			istrinya berusia kurang dari 15 tahun dan sudah haid, atau istri sudah berumur lebih dari 50 tahun, tetapi masih haid (datang bulan).
2	Rasio PLKB/PKB	$\frac{\text{Jumlah Desa/Kelurahan}}{\text{Jumlah PLKB/PKB}}$	<p>Jumlah Desa/Kelurahan adalah jumlah desa/kelurahan di satu wilayah Kabupaten/Kota.</p> <p>Petugas Lapangan Keluarga Berencana (PLKB) adalah pegawai Negeri Sipil (PNS) atau non PNS yang diangkat oleh pejabat berwenang yang mempunyai tugas, tanggung jawab untuk melaksanakan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan KB.</p> <p>Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) adalah jabatan fungsional PNS yang diberi tugas, tanggung jawab wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat berwenang sebagai pejabat fungsional untuk melaksanakan kegiatan penyuluhan, pelayanan, pelaporan, evaluasi dan pengembangan program Keluarga Berencana Nasional.</p>

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Tahun 2018 - 2023 merupakan penjabaran visi, misi dan program Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana selama 5 (lima) tahun ke depan dengan memperhatikan kebijakan pembangunan yang mengacu pada RPJMD Kabupaten Nganjuk Tahun 2018 -2023.

Dengan telah tersusunnya Rencana Strategis Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018-2023, maka Renstra ini harapannya dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas PPKB Kab. Nganjuk masa periode TA. 2018-2023.

Dengan adanya dokumen Rencana strategis ini, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut :

1. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pengendalian Penduduk Kabupaten Nganjuk tahun 2018-2023 sebagai pedoman dalam menyusun Rencana Kerja Tahunan (Renja) yang selanjutnya dilaksanakan melalui program dan kegiatan.
2. Program kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk Tahun 2018-2023 sebagai acuan bagi Aparatur Perencanaan dalam mengusulkan Rencana Kegiatan
3. Sasaran dan indikator yang tercantum dalam Dokumen Renstra Dinas PPKB Kabupaten Nganjuk mendukung tercapainya sasaran dan indikator Kinerja Kabupaten yang telah ditetapkan.